

Hubungan Kesesuaian Kebijakan Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai Dengan Perilaku Masyarakat Di Kelurahan Tondo Kota Palu

The Relationship Between The Suitability Of The Policy To Reduce The Use Of Single-Use Plastics And Community Behavior In Tondo Sub-District, Palu City

Moh. Sukran SY Thaib¹, Mohamad Andri², Muhammad Syukran³

Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Palu

mohsukran@gmail.com
(0813-9922-557)

ABSTRAK

Permasalahan sampah plastik sekali pakai telah menjadi isu global yang berdampak signifikan terhadap lingkungan. Pemerintah Kota Palu telah menerbitkan kebijakan pengurangan plastik melalui Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2021 sebagai upaya meminimalisir sampah plastik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kesesuaian kebijakan pengurangan plastik sekali pakai dengan perilaku penggunaan plastik masyarakat di Kelurahan Tondo Kota Palu. Desain penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif cross-sectional. Sampel sebanyak 100 responden dipilih dengan purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dan dianalisis menggunakan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden menilai kebijakan sesuai (70%), memiliki pengetahuan tinggi (72%), sikap positif (65%), tindakan baik (53%), tetapi perilaku tidak mendukung (55%). Terdapat hubungan signifikan antara kesesuaian kebijakan dengan pengetahuan ($p=0,006$). Namun, tidak terdapat hubungan dengan sikap ($p=0,253$), tindakan ($p=0,088$), dan perilaku penggunaan plastik ($p=0,150$). Penelitian ini merekomendasikan perlunya strategi edukasi dan penguatan kebijakan yang lebih efektif agar perubahan perilaku dapat tercapai

Kata Kunci : Plastik Sekali Pakai; Kebijakan Publik; Perilaku Lingkungan, Kelurahan Tondo; Kesehatan Masyarakat

PUBLISHED BY :

Alpro Publication

Address :

Jl. Karana, Kelurahan Mambo, Kecamatan Palu Utara,
Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

Email :

admin@journal.alpropublication.com

Phone :

+6282290091372



ABSTRACT

The issue of single-use plastic waste has become a global concern with significant environmental impacts. The Palu City Government issued Mayor Regulation No. 40 of 2021 as an effort to reduce plastic waste. This study aimed to analyze the relationship between the suitability of the single-use plastic reduction policy and the community's plastic usage behavior in Tondo Sub-district, Palu City. This research used a quantitative cross-sectional approach. A sample of 100 respondents was selected through purposive sampling. Data were collected using structured questionnaires and analyzed using the chi-square test. The results showed that most respondents considered the policy appropriate (70%), had high knowledge (72%), positive attitudes (65%), good practices (53%), but unsupportive behavior (55%). There was a significant relationship between policy suitability and knowledge ($p=0.006$). However, no significant relationship was found with attitude ($p=0.253$), practice ($p=0.088$), and behavior ($p=0.150$). This study recommends more effective education strategies and policy reinforcement to achieve behavioral change.

Keywords : Public Policy; Single-Use Plastic; Community Behavior; Palu City; Diffusion Of Innovation

PENDAHULUAN

Sampah plastik sekali pakai merupakan salah satu isu lingkungan global yang mendesak, karena plastik jenis ini dirancang hanya untuk satu kali penggunaan dan sulit terurai dalam jangka panjang.¹ Jenis plastik seperti kantong belanja banyak digunakan masyarakat karena praktis, namun secara tidak langsung memperbesar volume sampah yang mencemari lingkungan.¹

Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua sebagai negara penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan, setelah China, dan diikuti oleh Filipina, Vietnam, serta Bangladesh.² Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa total timbunan sampah laut nasional mencapai 1,2 juta ton, dengan 490 ribu ton di antaranya adalah sampah plastik.³ Sekitar 83% sampah tersebut tidak terkelola dengan baik.³ KLHK juga memperkirakan bahwa tanpa kebijakan dan intervensi konkret, jumlah sampah plastik di lautan dapat mencapai 53 juta metrik ton per tahun pada 2030.⁴

Dalam merespons kondisi ini, sejumlah pemerintah daerah mulai menerapkan kebijakan pengurangan plastik sekali pakai. Contohnya adalah Pemerintah Kota Denpasar melalui Perwali Nomor 36 Tahun 2018 dan Kota Banjarmasin melalui Perwali Nomor 18 Tahun 2016, yang berhasil mengurangi 54 juta lembar plastik dalam kurun dua tahun.⁵ Sayangnya, kebijakan ini masih bersifat lokal dan belum diadopsi secara menyeluruh oleh seluruh wilayah Indonesia.⁵

Upaya pemerintah pusat melalui program kantong plastik berbayar pada 2016 dinilai kurang efektif karena tidak sejalan dengan konsep dasar pengurangan plastik sekali pakai.⁶ Lemahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap dampak buruk plastik terhadap lingkungan menjadi salah satu penyebab utama tidak optimalnya pelaksanaan kebijakan tersebut.⁶

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Palu mengeluarkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dan Styrofoam. Kebijakan ini bertujuan untuk membatasi konsumsi plastik, terutama di daerah padat aktivitas perdagangan seperti Kelurahan Tondo.⁷ Namun, sejauh ini efektivitas pelaksanaannya masih belum menunjukkan perubahan signifikan dalam perilaku masyarakat.⁷

Menurut teori *Diffusi Inovasi* yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers, adopsi suatu inovasi sangat bergantung pada derajat kesesuaiannya (*compatibility*) dengan nilai, norma, dan kebutuhan masyarakat.⁸ Jika suatu kebijakan tidak dianggap relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, maka resistensi terhadapnya akan tinggi.⁸ Dalam konteks penggunaan plastik sekali pakai, perilaku masyarakat dipengaruhi oleh tiga faktor utama: pengetahuan, sikap, dan tindakan.⁹

Dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang belum menerapkan pengurangan plastik secara konsisten, meskipun kebijakan telah diberlakukan.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi kendala dari aspek sosial dan budaya yang memengaruhi kebiasaan masyarakat.⁹ Selain itu, gaya hidup konsumtif juga turut berperan dalam tingginya penggunaan plastik sekali pakai.⁹

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross-sectional. Populasi adalah masyarakat Kelurahan Tondo yang terpapar kebijakan pengurangan plastik. Jumlah sampel 100 responden yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Instrumen penelitian berupa kuesioner terstruktur yang mencakup variabel kesesuaian kebijakan, pengetahuan, sikap, tindakan, dan perilaku penggunaan plastik. Data dianalisis menggunakan uji chi-square dengan tingkat signifikansi 5%.

HASIL

Karakteristik Responden

Mayoritas responden berusia 26–40 tahun (60%), pendidikan SMA/ sederajat (55%), dan bekerja sebagai wiraswasta (48%).

Tabel 1. Distribusi Variabel Penelitian

Variabel	Kategori	Frekuensi (%)
Kesesuaian Kebijakan	Sesuai	70
	Tidak Sesuai	30
Pengetahuan	Tinggi	72
	Rendah	28
Sikap	Positif	65
	Negatif	35
Tindakan	Baik	53
	Kurang	47
Perilaku	Mendukung	45
	Tidak Mendukung	55

Dari hasil tabel di atas Sebagian besar responden (70%) menilai kebijakan pengurangan plastik sekali pakai sebagai “sesuai”. Pengetahuan responden tergolong tinggi (72%), sikap positif (65%), dan tindakan tergolong baik (53%). Namun demikian, lebih dari separuh (55%) masih menunjukkan perilaku tidak mendukung kebijakan

Tabel 2. Hasil Uji Chi-Square

Hubungan	P-Value
Kesesuaian Kebijakan Pengetahuan	0,006
Kesesuaian Kebijakan Sikap	0,253
Kesesuaian Kebijakan Tindakan	0,88
Kesesuaian Kebijakan Perilaku Penggunaan	0,150

Ket: $p < 0,05$ signifikan

Dari hasil tabel menunjukkan uji chi-square menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kesesuaian kebijakan dengan pengetahuan ($p=0,006$), namun tidak terdapat hubungan signifikan dengan sikap ($p=0,253$), tindakan ($p=0,088$), dan perilaku ($p=0,150$).

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara kesesuaian kebijakan pengurangan plastik sekali pakai dengan perilaku masyarakat dalam penggunaannya di Kelurahan Tondo, Kota Palu. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa meskipun mayoritas responden menilai kebijakan tersebut relevan (70%) dan memiliki tingkat pengetahuan tinggi (72%), namun persentase sikap positif (65%), tindakan baik (53%), dan perilaku yang mendukung (45%) belum menunjukkan proporsi yang memadai untuk mendukung efektivitas kebijakan secara optimal. Secara statistik, hanya variabel pengetahuan yang memiliki hubungan signifikan dengan persepsi kesesuaian kebijakan ($p = 0,006$), sedangkan hubungan dengan sikap ($p = 0,253$), tindakan ($p = 0,088$), dan perilaku secara keseluruhan ($p = 0,150$) tidak signifikan.

Hasil ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap relevansi suatu kebijakan memang menjadi fondasi awal terjadinya perubahan perilaku. Hal ini sejalan dengan pandangan *Everett M. Rogers* dalam *Teori Difusi Inovasi*, yang menyebutkan bahwa tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, norma, serta kebutuhan sosial merupakan indikator penting dalam keberhasilan proses adopsi. Namun demikian, penelitian ini juga menegaskan bahwa kesesuaian semata tidak cukup untuk mendorong perubahan perilaku yang komprehensif.

Tingginya tingkat pengetahuan responden menunjukkan bahwa informasi mengenai kebijakan pengurangan plastik telah tersebar dengan baik, baik melalui media, sosialisasi formal, maupun komunikasi antarmasyarakat. Namun, peningkatan pengetahuan tidak secara otomatis mengubah sikap maupun tindakan nyata. Hal ini memperkuat asumsi bahwa terdapat kesenjangan antara pengetahuan dan implementasi perilaku, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kebiasaan, kenyamanan, akses terhadap alternatif ramah lingkungan, serta tekanan sosial.

Temuan bahwa sikap dan tindakan tidak berhubungan secara signifikan dengan kesesuaian kebijakan menunjukkan bahwa meskipun masyarakat memahami dan menerima keberadaan kebijakan, mereka belum memiliki dorongan internal yang kuat untuk mengubah perilaku. Sikap bukan hanya terbentuk dari pengetahuan, tetapi juga dari pengalaman, nilai pribadi, dan pengaruh lingkungan. Sementara itu, tindakan nyata sangat bergantung pada kemudahan dalam mengakses solusi pengganti plastik serta dukungan regulatif dari pemerintah dan pelaku usaha.

Rendahnya proporsi perilaku yang mendukung meskipun kebijakan dinilai sesuai mengindikasikan adanya hambatan struktural dan kultural dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku tidak cukup hanya melalui kebijakan formal, melainkan juga membutuhkan pendekatan sistemik melalui edukasi berkelanjutan, perubahan gaya hidup, penyediaan sarana alternatif, serta kolaborasi multipihak.

Dalam konteks implementasi kebijakan publik, keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi regulasi, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaannya. Dibutuhkan sinergi antara pembuat kebijakan, pelaksana di lapangan, dan masyarakat sebagai sasaran. Peran pemimpin opini, agen perubahan, dan tokoh masyarakat sangat penting dalam mendorong perubahan perilaku kolektif.

Penelitian ini sejalan dengan studi Riyani Afila dkk. (2022) yang menunjukkan pentingnya edukasi dan monitoring dalam implementasi kebijakan pengurangan plastik di Kota Semarang. Temuan ini juga diperkuat oleh Ashidiqy (2014) yang menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek budaya dan perilaku konsumtif dalam menentukan efektivitas kebijakan lingkungan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di Kota Palu dinilai sesuai oleh sebagian besar masyarakat. Namun, kesesuaian kebijakan ini hanya berhubungan signifikan dengan pengetahuan, dan tidak berdampak langsung terhadap perilaku secara keseluruhan. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan tidak cukup bergantung pada isi kebijakan, namun juga pada bagaimana kebijakan tersebut diinternalisasi dan dipraktikkan oleh masyarakat.

Saran

1. Pemerintah Kota Palu perlu memperkuat implementasi kebijakan melalui edukasi berkelanjutan, kampanye publik yang masif, serta pemberdayaan komunitas lokal sebagai agen perubahan perilaku.

2. Pelibatan pelaku usaha seperti minimarket dan pasar tradisional sebagai mitra strategis dalam mengurangi distribusi plastik sekali pakai sangat penting dilakukan.
3. Pendekatan berbasis budaya lokal dapat meningkatkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan. Misalnya, memperkenalkan kembali kantong belanja tradisional yang ramah lingkungan.
4. Evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan perlu dilakukan untuk menyesuaikan intervensi dengan dinamika perilaku masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Rasyid, dkk. (2023). *Penggunaan Plastik Sekali Pakai dan Dampaknya terhadap Lingkungan*.
2. Jambeck, J.R., dkk. (2015). *Plastic waste inputs from land into the ocean*. *Science*.
3. Astuti, D. (2016). *Kajian Kebijakan Pengelolaan Sampah di Indonesia*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Borrelle, S.B., dkk. (2020). *Predicted growth of plastic waste in oceans*. *Science*.
5. Rahmayani, N. (2021). *Evaluasi Kebijakan Pengurangan Plastik Sekali Pakai di Indonesia*. Jurnal Kebijakan Publik.
6. Ibid.
7. Pemerintah Kota Palu. (2021). *Peraturan Wali Kota Palu No. 40 Tahun 2021 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dan Styrofoam*.
8. Rogers, E.M. (1983). *Diffusion of Innovations* (3rd ed.). New York: Free Press.
9. Ashidiqy, I. (2014). *Perilaku Penggunaan Plastik dan Faktor Sosial Budaya Masyarakat*. Jurnal Sosial dan Lingkungan.